

Tahap 1 menentukan outcome

Cara menentukan outcome

- a Mandat/Tugas dan Fungsi
- b Permasalahan yang dihadapi
- c Ekspektasi atau harapan masyarakat dan stake holder

Masyarakat mengekspektasi :
Pemerintah lebih transparan dan Akuntabel
dalam penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan

Trik menentukan outcome

- 1 Outcome harus dirumuskan dengan kesepakatan bersama
- 2 Outcome instansi harus menggambarkan hasil yang strategis
- 3 Outcome tidak harus ketiga faktor pembentuk diatas , namun umumnya bisa saling terkait
- 4 Jika outcome strategis bukan final outcome atau intermediate outcome maka instansi harus melihat kembali kebenaran dari kinerja outcome tersebut



Tahap 1 Menentukan outcome Inspektorat Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN

Note

Sasaran strategis Pemda

Tahap 2

identifikasi CSF yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja

Trik menentukan CSF

- 1 CSF menggambarkan isu faktual
- 2 CSF menggambarkan kebutuhan mencapai kinerja dimasa mendatang
- 3 CSF mempertimbang perubahan lingkungan
- 4 Pastikan CSF adalah sebab atau cara dan outcome adalah akibat atau hasil

	CSF Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN	Kondisi yang diperlukan
1	Belum optimalnya sistem pengawasan internal	Meningkatnya kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik
2	Belum optimalnya kepatuhan SKPD/Desa terhadap ketentuan perundang-undangan	Meningkatnya akuntabilitas SKPD/Desa
3	Belum optimalnya tindaklanjut hasil pengawasan	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan APIP/Eksternal
4	Belum terkelolanya manajemen partisipasi masyarakat dengan baik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
5	Belum terwujudnya pelayanan prima pada setiap elemen layanan pada masyarakat	Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat

Tahap 3

Uraikan CSF ke kondisi antara sampai kondisi paling teknis atau operasional

- 1 trik menguraikan kondisi antara sampai ke kondisi operasional (sebagai bahan menyusun pohon kinerja)
- 2 jangan kaitkan dulu dengan komponen perencanaan
- 3 jangan kaitkan dulu dengan sotk eksisting
- 4 jangan kaitkan dulu dengan nama program atau kegiatan
- 5 jangan kaitkan dulu dengan anggaran
- 6 identifikasi adanya crosscutting dengan organisasi lain
- 7 jangan redundansi atau kondisi dituangkan berulang kali
- 8 cek lagi siapa tahu alpa menentukan kondisi anantara yang urgen
- 9 eliminasi variabel yg tidak memiliki pengaruh besar

CSF yang sudah dirubah ke bahasa kondisi pada tahap 2	Kondisi yang diperlukan (kondisi antara sampai kondisi paling operasional	Keterangan
Meningkatnya kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	kondisi antara utama
	Terpenuhinya cakupan dan jenis pembinaan dan pengawasan perangkat daerah dan desa	kondisi antara
	Terpenuhinya tenaga aparatur pengawas yang profesional yang sesuai dengan ABK	kondisi operasional
	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur tenaga pengawas	kondisi operasional
	Terselenggaranya diklat substansi	kondisi operasional
Meningkatnya akuntabilitas SKPD/Desa	Meningkatnya kepatuhan SKPD dan desa terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan kerugian daerah	Kondisi antara utama
	Meningkatnya Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi SKPD	kondisi antara
	Terlaksananya sosialisasi PMPRB	kondisi operasional
	Terlaksananya PMPRB	kondisi operasional
	Terwujudnya unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan /atau WBM	Kondisi antara
	Terlaksananya sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK	kondisi operasional
	Tersedianya unit pelayanan publik yang mendapatkan predikat WBK dan/ WBBM	kondisi operasional
	Terlaksananya aksi pencegahan korupsi	kondisi antara
	Terpenuhinya data dukung area intervensi MCP	kondisi operasional
	Terlaksananya sosialisasi aksi pencegahan korupsi dilingkup pemerintah kabupaten Balangan	kondisi operasional
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa	kondisi operasional
Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan APIP/Eksternal	Meningkatnya prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	kondisi antara utama
	Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi Kerugian Keuangan Daerah	Kondisi Antara
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan	kondisi operasional
	Terlaksananya asistensi dan pendampingan terhadap penyelesaian temuan	kondisi operasional

	Meningkatnya jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	kondisi antara
	Terlaksananya sosialisasi atau FGD implementasi SAKIP SKPD	kondisi operasional
	Terlaksananya evaluasi SAKIP	kondisi operasional
	Tertanganinya pengaduan masyarakat	kondisi antara
	Terselesaikannya audit investigasi yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi	kondisi operasional
	Terlaksananya koordinasi penanganan DUMAS dengan APH	kondisi operasional
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Croscutiing
	Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat	Criscutiing

Tahap 4 merumuskan indikator kinerja

Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja	Keterangan
Tahap 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN	indeks integritas	kinerja strategis skpd
Tahap 2	Meningkatnya kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik	persentase cakupan pengawasan yang terlaksana	kinerja strategis
Tahap 3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terpenuhinya cakupan dan jenis pembinaan dan pengawasan perangkat daerah dan desa	Prosentase cakupan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah dan desa	kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terpenuhinya tenaga aparatur pengawas yang profesional yang sesuai dengan ABK	Jumlah tenaga aparatur penagawas yang bersertifikasi	kinerja operasional
Tahap 3	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur tenaga pengawas	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	kinerja operasional
Tahap 3	Terselenggaranya diklat substansi	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat substansi	kinerja operasional
tahap 2	Meningkatnya akuntabilitas SKPD/Desa	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	kinerja strategis
Tahap 3	Meningkatnya kepatuhan SKPD dan desa terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan kerugian daerah	Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Meningkatnya Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi SKPD	Prosentase SKPD yang mendapatkan nilai PMPRB B	kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya sosialisasi PMPRB	Jumlah sosialisasi PMPRB/Pembangunan ZI menuju WBK	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya PMPRB	Jumlah SKPD yang mendapatkan nilai PMPRB	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya unit pelayanan publik yang mendapatkan predikat WBK dan/ WBBM	Persentase unit kerja yang mendapatkan predikat WBK	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya aksi pencegahan korupsi	Skor nilai MCP dari KPK	kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terpenuhinya data dukung area intervensi MCP	Porsentase pemenuhan data dukung area intervensi	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya sosialisasi aksi pencegahan korupsi dilingkup pemerintah kabupaten Balangan	Jumlah sosilasaki aksi pencegahan korupsi	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa	prosentase realisasi hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa	kinerja operasional
Tahap 2	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan APIP/Eksternal	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditan	kinerja strategis
Tahap 3	Meningkatnya prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti	kinerja taktikal intermediate

Tahap 3	Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi Kerugian Keuangan Daerah	Prosentase penyelesaian kerugian daerah	kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan	Persentase SKPD / desa yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya asistensi dan pendampingan terhadap penyelesaian temuan	jumlah pemutakhiran data yang dilaksanakan	kinerja operasional
Tahap 3	Meningkatnya jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	Prosentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB	kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya sosialisasi atau FGD implementasi SAKIP SKPD	Jumlah sosialisasi SAKIP SKPD	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya evaluasi SAKIP	Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat BB	kinerja operasional
Tahap 3	Tertanganinya pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang selesai ditangani	kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terselesaikannya audit investigasi yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi	Jumlah laporan laporan hasil audit investigasi	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya koordinasi penanganan DUMAS dengan APH	Jumlah laporan DUMAS (limpahan kasus APH) yang diselesaikan oleh APIP	kinerja operasional
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan		Croscutiing
	Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat		Criscutiing

Tahap 5 menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan

Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja		Keterangan	
Tahap 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN	Indeks Integritas	kinerja strategis skpd	Tujuan SKPD	
Tahap 2	Meningkatnya kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan	persentase cakupan pengawasan yang terlaksana	kinerja strategis	sasaran kedua SKPD	PK JPT
Tahap 3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Terpenuhinya cakupan dan jenis pembinaan dan pengawasan perangkat daerah dan desa	Prosentase cakupan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah dan desa	kinerja taktikal immediate	Sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terpenuhinya tenaga aparatur pengawas yang profesional yang sesuai dengan ABK	Jumlah tenaga aparatur penagawas yang bersertifikasi	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur tenaga pengawas	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Terselenggaranya diklat substansi	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat substansi	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 2	Meningkatnya akuntabilitas SKPD/Desa	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	kinerja strategis	sasaran pertama SKPD	PK JPT
Tahap 3	Meningkatnya kepatuhan SKPD dan desa terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan kerugian daerah	Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Meningkatnya Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi SKPD	Prosentase SKPD yang mendapatkan nilai PMPRB B	kinerja taktikal immediate	Sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya sosialisasi PMPRB	Jumlah sosialisasi PMPRB/Pembangunan ZI menuju WBK	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya PMPRB	Jumlah SKPD yang mendapatkan nilai PMPRB	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Tersedianya unit pelayanan publik yang mendapatkan predikat WBK dan/ WBBM	Persentase unit kerja yang mendapatkan predikat WBK	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya aksi pencegahan korupsi	Skor nilai MCP dari KPK	kinerja taktikal immediate	Sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terpenuhinya data dukung area intervensi MCP	Porsentase pemenuhan data dukung area intervensi	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya sosialisasi aksi pencegahan korupsi dilingkup pemerintah kabupaten Balangan	Jumlah sosilasasi aksi pencegahan korupsi	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa	prosentase realisasi hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 2	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan APIP/Eksternal	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditan	kinerja strategis	sasaran ketiga SKPD	PK JPT
Tahap 3	Meningkatnya prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi Kerugian Keuangan Daerah	Prosentase penyelesaian kerugian daerah	kinerja taktikal immediate	Sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan	Persentase SKPD / desa yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya asistensi dan pendampingan terhadap penyelesaian temuan	jumlah pemutakhiran data yang dilaksanakan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Meningkatnya jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	Prosentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB	kinerja taktikal immediate	Sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
	Terlaksananya sosialisasi atau FGD implementasi SAKIP SKPD	Jumlah sosialisasi SAKIP SKPD	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
	Terlaksananya evaluasi SAKIP	Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat BB	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tertanganinya pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masayarkat yang selesai ditangani	kinerja taktikal immediate	Sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terselesaikannya audit investigasi yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi	Jumlah laporan laporan hasil audit investigasi	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya koordinasi penanganan DUMAS dengan APH	Jumlah laporan DUMAS (limpahan kasus APH) yang diselesaikan oleh APIP	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF

Tahap 2	Belum terkelolanya manajemen partisipasi masyarakat dengan baik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	CROSSCUTTING
Tahap 2	Belum terwujudnya pelayanan prima pada setiap elemen layanan pada masyarakat	Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat	

